



TESIS

Judul:

Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (On Going Concern) Bagi Debitor Yang Dipailitkan Ditinjau Berdasarkan Perspektif Keadilan

Disusun oleh:

ANDRE KIEMAS
NIM. 207222001

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA (*ON GOING CONCERN*) BAGI DEBITOR YANG DIPAILITKAN DITINJAU
BERDASARKAN PERSPEKTIF KEADILAN**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

oleh:

Nama : Andre Kiemas

NIM : 207222001

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : ANDRE KIEMAS
NIM : 207222001
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (On Going Concern) Bagi Debitor Yang Dipailitkan Ditinjau Berdasarkan Perspektif Keadilan
Title : The Application of the Going Concern Principle for Bankrupt Debtors from the Perspective of Justice

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 11-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
3. RICHARD C.ADAM, S.H., LL.M., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 11-Juli-2024

Kelua Program Studi



JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.

Persetujuan

Nama : ANDRE KIEMAS
NIM : 207222001
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (On Going Concern) Bagi Debitor Yang Dipailitkan Ditinjau Berdasarkan Perspektif Keadilan

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 12-Juni-2024

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
NIK/NIP: 10208001

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

ABSTRAK

Dalam teori dan praktik, Undang-Undang Kepailitan tidak mengalami kemajuan yang signifikan dalam perkembangannya. Baru pada tahun 1998, undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tahun 2004 dengan cakupan penerapan hukum yang lebih luas. Perubahan ini diperlukan karena perkembangan masyarakat dan persyaratan hukum, namun peraturan saat ini masih belum cukup sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang secara adil, cepat, transparan serta efisien. Salah satunya mengenai kewajiban untuk menyatakan debitor pailit, yang dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa debitor tidak akan dinyatakan pailit. Hal ini tentu bertentangan dengan filosofi umum hukum kepailitan yang memandang kepailitan debitor. Kebiasaan debitor dan kreditor ketika debitor tidak dapat membayar utangnya. Tidak adanya uji kepailitan menunjukkan bahwa hukum kepailitan lebih berperan dalam melindungi kepentingan kreditor. Untuk memastikan dasar filosofis yang jelas dan memenuhi asas keadilan serta asas keseimbangan, konsep prinsip kelangsungan usaha harus dijelaskan dengan jelas dalam aturan kepailitan di masa depan. Dengan demikian debitor dan kreditor dapat menyelesaikan permasalahan utang secara adil, cepat, transparan dan efisien. Jenis penelitian hukum normatif digunakan dalam penulisan tesis ini.

Kata kunci: Asas Kelangsungan Usaha; Keadilan; Perlindungan Hukum Kepailitan

ABSTRACT

In theory and practice, the Bankruptcy Law has not experienced significant progress in its development. It was only in 1998 that the law was replaced by the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law in 2004, with a broader scope of legal application. This change was necessary due to societal developments and legal requirements; however, the current regulations are still insufficient as a legal means to resolve debt issues fairly, quickly, transparently, and efficiently. One issue is the obligation to declare a debtor bankrupt, which in Article 2 paragraph (1) states that a debtor will not be declared bankrupt. This is certainly contrary to the general philosophy of bankruptcy law, which views the insolvency of a debtor. The habit of debtors and creditors when the debtor is unable to pay their debt. The absence of a bankruptcy test indicates that bankruptcy law plays a greater role in protecting creditors' interests. To ensure a clear philosophical basis that meets the principles of justice and balance, the concept of the going concern principle must be clearly explained in future bankruptcy regulations. Thus, debtors and creditors can resolve debt issues fairly, quickly, transparently, and efficiently. A normative legal research method is used in writing this thesis.

Keywords: On Going Concern Principle, Justice, Bankruptcy Protection

KATA PENGANTAR

Atas segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu memanjatkan doa dan puji syukur kepada Nya seiring berjalannya proses penelitian mulai sampai penulisan selesai yang berjudul “PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA (*ON GOING CONCERN*) BAGI DEBITOR YANG DIPAILITKAN DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF Keadilan”. Penulis berharap agar penulisan dalam tesis ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang kepailitan di Indonesia dan berguna kepada setiap pembaca.

Selanjutnya dengan terselesaikannya tesis ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam memberi semangat dan membimbing penulis tanpa henti, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Kepada Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Kepada Dr. Ade Adhari, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Kepada Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam melakukan penulisan tesis ini dan rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik;
5. Kepada semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara maupun staff yang membantu penulis dari awal perkuliahan sampai akhir;

6. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendukung penulis dan memberikan perhatian kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, serta selalu sabar dalam menasihati penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik, serta sering memberikan nasihat-nasihat tentang kebaikan;
7. Kepada para narasumber penulis yang meluangkan waktu dan ilmunya demi proses pembuatan tesis ini yaitu Prof. Dr. Amad Sudiro, S>H., M.H., M.M., M.Kn., Dr. Richard Adam, S.H., LL.M., Salvian Salmon, S.H., M.H.;
8. Kepada kakak-kakak dari penulis yaitu Michael dan Devy Fransisca yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik;
9. Kepada pacar penulis yaitu Shyline yang selalu memberi semangat dan mendukung penulis melakukan penelitian tesis ini, serta menemani penulis dalam proses penulisan tesis ini, yang sering memberikan kebahagiaan pada hidup penulis dan selalu sabar menghadapi penulis, dan selalu mau mendengarkan cerita-cerita dari penulis;
10. Kepada teman-teman setia penulis dalam grup ‘Sohib Untar’ yaitu Panji, Qonita, Yulius, Brendah, dan Harry yang selalu ada sejak tahun 2023 dan merupakan teman-teman pertama penulis saat kuliah; dan
11. Kepada semua pihak yang membantu penulis dalam proses pembuatan tesis ini namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Pada akhirnya tidak ada yang sempurna dalam penulisan tesis ini, namun sekiranya penulis berharap agar tesis ini dapat berguna bagi siapapun yang membaca tesis ini.

Jakarta, Juni 2024

Pernyataan

Nama : ANDRE KIEMAS
NIM : 207222001
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (On Going Concern) Bagi Debitor Yang Dipailitkan Ditinjau Berdasarkan Perspektif Keadilan

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12-Juni-2024
Yang menyatakan



ANDRE KIEMAS
NIM. 207222001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Kerangka Konseptual	16
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematikan Penulisan	20
BAB II KERANGKA TEORITIS	22
A. Teori Keadilan	22
1. Konsep Keadilan “ <i>Justice as Fairness</i> ” John Rawls	22

2. Kewajiban Negara Menurut Teori Keadilan “ <i>Justice as Fairness</i> ”	29
B. Teori Pembangunan Hukum	32
C. Teori Transplantasi Hukum	44
D. Teori Kepailitan	52
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	68
A. Kepailitan di Amerika Serikat	68
B. Asas Kelangsungan Usaha di Amerika Serikat	83
C. Kepailitan di Indonesia	101
D. Asas Kelangsungan Usaha di Indonesia	106
E. Contoh Kasus Kepailitan	114
F. Data Hasil Wawancara	117
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	71
A. Urgensi Penggunaan Tes Insolvensi Sebagai Syarat Permohonan Pailit di Indonesia	122
B. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (<i>On Going Concern</i>) Bagi Debitor Yang Dipailitkan Tanpa Mempertimbangkan Kemampuan Membayar Ditinjau Berdasarkan Perspektif Keadilan	137
BAB V PENUTUP	152
A. Kesimpulan.....	152
B. Saran.....	153

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUKPKPU	: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
PKPU	: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UUPT	: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
UU Perbankan	: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
UU BUMN	: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
2. Lampiran 2 : SK Dosen Pembimbing
3. Lampiran 3 : Rekap Berita Acara Bimbingan
4. Lampiran 4 : Surat Keterangan Hasil Turnitin Jurnal
5. Lampiran 5 : Surat Keterangan Hasil Turnitin Tesis
6. Lampiran 6 : Bukti Publish Jurnal
7. Lampiran 7 : Surat Permohonan Wawancara
8. Lampiran 8 : Putusan Kasasi Nomor 075 K / Pdt.Sus / 2007